

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penolakan yang dilakukan buruh memiliki faktor penyebab yang terjadi karena adanya gap antara *Value Expectation* dan *Value Capabilities*. Pada penelitian yang penulis teliti buruh memiliki *Value Expectation* dimana buruh memiliki harapan yang tinggi terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah seperti kenaikan gaji buruh untuk kebutuhan hidup, akan tetapi dibalik naiknya gaji buruh terdapat *Value Capabilities* yang diberikan negara yaitu salah satunya pemotongan gaji buruh dalam memenuhi program Tapera 2,5%. Selain itu *Value Expectation* buruh yang lain adalah negara memenuhi kewajibannya dalam memberikan tempat tinggal yang layak bagi rakyatnya, akan tetapi *Value Capabilities* yang diberikan pemerintah yaitu membuat program Tapera sebagai kewajiban bagi buruh dan membebankan pemotongan lebih berat ke buruh dan dinilai teknis yang diberikan tidak jelas dan membuat ambigu.

Sehingga Gap yang terjadi antara *Value Expectation* dan *Value Capabilities* menjadi alasan bagi buruh menolak kebijakan Tapera yang mana hal ini merupakan *Extraction* tanpa solusi. *Extraction* tanpa solusi menjadi label ketika membahas mengenai kebijakan Tapera, karena merepresentasikan bahwa kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dengan tujuan memberikan kesejahteraan akan tetapi pada kenyataannya dipersepsikan sebagai permasalahan baru yang timbul karena kondisi nyatanya tidak selaras dengan apa yang buruh harapkan. Negara membuat kebijakan Tapera dengan tujuan dalam mengurangi angka backlog. Akan tetapi bagi buruh yang menjadi permasalahan bahwa pemotongan gaji dirasakan secara nyata

dan disegerakan oleh pemerintah tidak adil dan memaksa. Pada titik ini menjadi awal dan faktor utama resistensi kolektif terbentuk karena adanya jarak antara kondisi nyata yang dirasakan masyarakat dengan tujuan kebijakan yang disajikan oleh pemerintah.

Resistensi yang dilakukan buruh dalam menolak kebijakan Tapera dalam penelitian ini memberikan gambaran antara buruh yang melakukan spektrum terbuka (aksi massa) dan spektrum tertutup (non-aksi), KSPI dan FSPMI yang melakukan spektrum terbuka menggunakan aksi massa yang dilakukan dengan cara penyebaran informasi di web koran perdjoeangan dan media sosial, dan pada puncaknya aksi menggunakan perlengkapan aksi yang dibawa seperti benner slogan penolakan dan lain sebagainya hal ini diharapkan dapat memantik perhatian pemerintah, akan tetapi KSPI dan FSPMI masih mengarahkan aksi massa ke jalur yang damai tidak anarkis.

Dan buruh yang melakukan spektrum tertutup seperti FPSI dan KSPN melakukan penolakannya terhadap kebijakan Tapera dengan cara persuratan, karena FPSI dan KSPN menganggap bahwa penolakan tidak hanya dengan aksi massa akan tetapi bisa digambarkan dengan lobbying kepada pemerintah langsung, Sehingga hal ini menunjukkan bahwa FPSI dan KSPN masih menganggap legitimasi dari pemerintah sebagai pembuat dan merevisi kebijakan khususnya Tapera.

Cara penolakan yang dilakukan buruh diatas termasuk kedalam *Non-Violent Protest*. Hal ini karena apa yang dilakukan buruh tidak menggunakan cara kekerasan secara fisik, dan cara penolakan buruh ini dalam 5 tahap terjadinya kekerasan, penolakan buruh ini hanya sampai di mobilisasi tidak sampai ke ledakan

kekerasan (Explosion of Violence) apalagi mencapai ke tahap *Interanal War/Rebel*, terlihat bukan karena ketidakmampuan akan tetapi karena pertimbangan bersama salah satunya faktor psikologis dan sosial.

Dengan ini jika dari pemerintah selaku aktor elit sering menganggap sebelah mata penolakan dari buruh ataupun dari masyarakat maka dapat dipastikan akan menjadi bom waktu bagi pemerintah untuk melihat kemarahan yang semakin besar dan masifnya penolakan atau protes yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah merepresentasikan legitimasi pemerintah atau kepercayaan rakyat kepada pemerintah sebagai pembuat dan pemangku kebijakan dan pemberi hak kepada buruh/rakyat akan semakin turun dan rusak.

#### **4.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, yaitu :

1. Subjek penelitian dalam pengambilan data terbatas, keterbatasan jumlah narasumber ini mengakibatkan informasi dan sudut pandang yang didapatkan dalam penelitian ini belum merepresentasikan kasus penolakan buruh terhadap Tapera di Kota Semarang yang lebih luas dan menyeluruh.
2. Jawaban yang diberikan oleh narasumber cenderung memiliki sudut pandang yang sama, kesamaan tersebut menyebabkan tidak adanya variasi sudut pandang yang didapatkan menjadi tidak beragam, sehingga jawaban yang diberikan lebih menunjukkan jawaban yang mengacu pada pandangan dan pengalaman yang sama.

#### **4.3 Saran**

Diperlukannya penguatan partisipasi publik antara pemerintah dengan buruh dalam merumuskan revisi kebijakan tapera. Penolakan yang dilakukan buruh menunjukkan keresahan mereka terhadap kebijakan tapera yang tidak melihat kondisi

sosial lapangan kelompok buruh atau pekerja. Maka dari itu diperlukan adanya refleksi dari pemerintah untuk melibatkan serikat pekerja dalam setiap keputusan yang di implementasikan dalam pembuatan kebijakan khususnya kebijakan tapera. Selain itu pemerintah diperlukan melakukan transparansi akan teknis tapera ataupun pengelolaan dana tapera, kejelasan mengenai ini harus disosialisasikan kepada buruh, karena transparansi ini diperlukan guna membangun legitimasi publik kepada kebijakan yang dibuat pemerintah khususnya tapera

Serikat buruh diharapkan dapat menguatkan konsolidasi internal serikat dalam menanggapi kebijakan yang dianggap memberikan dampak negatif atau merugikan bagi buruh. Gerakan penolakan yang dilakukan serikat pekerja diharapkan tidak berhenti pada mobilisasi aksi massa yang sementara akan tetapi dapat terus berkelanjutan dalam mengawal isu yang digaungkan, dalam hal ini buruh perlu membangun koalisi dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi dan kelompok advokasi yang ada agar apa yang dituntutkan oleh buruh mempunyai legitimasi yang kuat di ruang publik. Dengan itu diperlukannya peningkatan literasi dan kesadaran politik dengan begitu buruh diharapkan dapat mengkritisi dan mengawal secara penuh kebijakan yang dibuat pemerintah dan tidak mudah termakan akan berita hoax dengan mentah mentah sehingga mudah tersulut api kemarahan.